

**ANALISIS PENDIDIKAN MENENGAH DAN KEJURUAN
DALAM MENERAPKAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
NASIONAL**

**ANALYSIS OF SECONDARY AND VOCATIONAL EDUCATION IN
IMPLEMENTING NATIONAL EDUCATION POLICY**

Iwan Setiawan¹, Anis Fauzi²

^{1,2}UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

¹iwansetiawanst0@gmail.com; ²anis_fauzi@uinbanten.ac.id

ABSTRACT

National education policy in Indonesia has set goals to improve the quality of education and expand access to secondary and vocational education. However, the implementation of the policy faces several challenges, such as lack of qualified human resources and lack of support from related parties. Therefore, this study aims to analyze the implementation of secondary and vocational education policies in Indonesia. This study used a qualitative approach by collecting data through in-depth interviews and document analysis. The results show that the implementation of secondary and vocational education policies in Indonesia still faces several challenges, including lack of facilities and infrastructure, lack of financial support, and lack of compatibility between curriculum and labor market needs. In addition, it is necessary to strengthen the role of the government and close cooperation between the government, industry, and educational institutions to improve the implementation of secondary and vocational education policies in Indonesia.

Keywords: Education, Middle and Vocational, National Policy

ABSTRAK

Kebijakan pendidikan nasional di Indonesia telah menetapkan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses ke pendidikan menengah dan kejuruan. Namun, implementasi kebijakan tersebut menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan kurangnya dukungan dari pihak terkait. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan menengah dan kejuruan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan menengah dan kejuruan di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, termasuk kurangnya fasilitas dan infrastruktur, kurangnya dukungan keuangan, dan kurangnya kesesuaian antara kurikulum dan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, diperlukan penguatan peran pemerintah dan kerjasama yang erat antara pemerintah, industri, dan institusi pendidikan untuk memperbaiki implementasi kebijakan pendidikan menengah dan kejuruan di Indonesia.

Kata Kunci: Pendidikan, Menengah dan Kejuruan, Kebijakan Nasional

Submitted	Accepted	Published
March 10 th 2023	March 16 th 2023	March 25 th 2023

PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan nasional suatu negara harus mencakup semua jenjang pendidikan, termasuk pendidikan menengah dan kejuruan. Pendidikan menengah dan kejuruan sangat penting karena mereka mempersiapkan siswa untuk karir mereka di masa depan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang komprehensif terhadap kebijakan pendidikan menengah dan kejuruan dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional.

Analisis kebijakan pendidikan menengah dan kejuruan dapat membantu dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan pendidikan nasional dalam hal pendidikan menengah dan kejuruan. Hal ini dapat membantu para pembuat kebijakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam memperbaiki kebijakan pendidikan nasional dalam bidang ini.

Pendidikan memiliki nilai yang strategis dan urgen dalam pembentukan suatu bangsa. Pendidikan itu juga berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa tersebut. Sebab lewat pendidikanlah akan diwariskan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa tersebut, karena itu pendidikan tidak hanya berfungsi untuk *how to know*, dan *how to do*, tetapi yang amat penting adalah *how to be*, bagaimana supaya *how to be*, terwujud maka diperlukan transfer budaya dan kultur.

Beberapa topik yang dapat dibahas dalam analisis kebijakan pendidikan menengah dan kejuruan adalah peran pendidikan menengah dan kejuruan dalam pembangunan ekonomi, tantangan dan peluang dalam pendidikan menengah dan kejuruan, ketersediaan dana untuk pendidikan menengah dan kejuruan, dan relevansi kurikulum pendidikan menengah dan kejuruan dalam dunia kerja.

Dalam menganalisis kebijakan pendidikan menengah dan kejuruan, dapat digunakan metode-metode seperti analisis SWOT, analisis deskriptif, dan analisis kebijakan. Metode-metode tersebut dapat membantu para analis dalam mengidentifikasi masalah, peluang, dan tantangan dalam kebijakan pendidikan menengah dan kejuruan.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, perlu dilakukan analisis yang komprehensif terhadap kebijakan pendidikan menengah dan kejuruan. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan menengah dan kejuruan, serta mempersiapkan siswa untuk karir mereka di masa depan.

METODE

Metode yang dapat digunakan dalam analisis kebijakan pendidikan menengah dan kejuruan dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional:

1. Analisis deskriptif: Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara detail karakteristik dan permasalahan dalam kebijakan pendidikan menengah dan kejuruan. Analisis deskriptif dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.
2. Analisis kebijakan: Metode ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan dalam pendidikan menengah dan kejuruan. Dalam analisis kebijakan, perlu dipahami secara mendalam tujuan, prinsip, serta program-program dalam kebijakan pendidikan menengah dan kejuruan yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. Analisis SWOT: Metode ini digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan menengah dan kejuruan dari sisi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT). Analisis SWOT dapat membantu para analis untuk mengidentifikasi permasalahan dan potensi dalam kebijakan pendidikan menengah dan kejuruan.
4. Kajian literatur: Metode ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan menengah dan kejuruan melalui kajian literatur atau sumber-sumber yang relevan.

Kajian literatur dapat dilakukan melalui studi dokumen, jurnal, dan publikasi terkait lainnya.

KAJIAN TEORI

1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Iskandar, 2012).

Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek (Thoha, 2012), yakni:

- a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.
- b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut. Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program/ aktivitas/ tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (stakeholders) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu (Haerul, Akib, & Hamdan, 2016). Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu sistem, yang meliputi: input proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan berwujud perumusan formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses politik yang dilakukan elit politik dan/ atau kelompok-kelompok penekan. Output dari proses kebijakan adalah kinerja kebijakan (Wahyudi, 2016).

Oleh karena itu, kebijakan tidak bersifat permanen. Kebijakan dibuat sekali untuk rentang waktu tertentu sebagai sebuah solusi atas permasalahan yang ada dan kepentingannya melayani (Godin, Rein, & Moran, 2006). Kebijakan publik merupakan suatu ilmu terapan (Freeman, 2006). Pengertian kebijakan public oleh para pakar didefinisikan secara beragam, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang melandasi perumusannya. Thoha (2012) memberikan penafisiran tentang kebijakan public sebagai hasil rumusan dari suatu pemerintahan. Dalam pandangan ini, kebijakan publik lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan

daripada proses hasil yang dibuat.

Mengenai kebijakan publik, lebih lanjut Wahab (2010) menyatakan bahwa :

- a. kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku/ tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan;
- b. kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri;
- c. kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas/ tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu;
- d. kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan. (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

2. Teori Sistem Pendidikan

Teori ini berfokus pada pemahaman sistem dan bagaimana unsur-unsur dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Sistem pendidikan dan iklim belajar mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri sendiri dan budaya belajar di kalangan masyarakat perlu terus dikembangkan agar tumbuh sikap dan perilaku yang kreatif, inovatif, dan berorientasi ke masa depan.

Sistem pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sistem pendidikan nasional dibedakan menjadi satuan pendidikan, jalur pendidikan, jenis pendidikan, dan jenjang pendidikan. Satuan pendidikan menyelenggarakan kegiatan belajar- mengajar yang dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan. Selanjutnya, terdapat tujuh jenis pendidikan yaitu pendidikan umum, pendidikan kejuruan,

pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan professional. (Djatmiko, 2003)

Bangsa Indonesia di awal kemerdekaannya sungguh sangat serius untuk membenahi pendidikan. Ada beberapa catatan sejarah dari kronologisnya menunjukkan keseriusan dan kesungguhan para pendiri Negara ini untuk

membenahi pendidikan. Catatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tahun 1946, membentuk panitia penyelidik pendidikan dan pengajaran.
2. Tahun 1947, Kongres Pendidikan I di Solo.
3. Tahun 1948, membentuk panitia pembentukan rancangan undang-undang pendidikan.
4. Tahun 1949, Kongres Pendidikan II di Yogyakarta.
5. Tahun 1950, lahirnya UU No. 4 Tahun 1950 undang-undang tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran (UUPN).
6. Tahun 1954, lahirnya UU No. 12 Tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya UU No. 4 Tahun 1950.
7. Tahun 1961, lahirnya undang-undang tentang Perguruan Tinggi.
8. Tahun 1965, lahirnya Majelis Pendidikan Nasional.
9. Tahun 1989, lahirnya undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN). UU No. 2 Tahun 1989.
10. Tahun 1990, lahirnya PP 27, 28, 29, 30 Tahun 1990.
11. Tahun 1991, lahirnya PP 72, 73 Tahun 1991.
12. Tahun 1992, lahirnya PP 38, 39.
13. Tahun 1999, lahirnya PP 60 dan 61.
14. Tahun 2003, lahirnya undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu UU No. 20 Tahun 2003 pengganti dari UU No. 2 Tahun 1989.

Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIII, Pasal 31 ayat (2), mengamanahkan bahwa pendidikan yang dimaksud harus diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai “suatu system pendidikan nasional”. System pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh dan terpadu : semesta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah Negara; menyeluruh dalam arti kata mencakup semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dan terpadu dalam arti adanya saling terkait antara pendidikan nasional dengan seluruh usaha pembangunan nasional.

Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya system pendidikan sebagai pranata social yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tentang zaman yang berubah.

Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut (Dedi Hamid, 2003):

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;

2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
 3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
 4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;
- Adapun strategi pembangunan pendidikan nasional disebutkan dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 yang meliputi :
1. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
 2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
 3. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
 4. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
 5. Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
 6. Penyediaan sarana belajar yang mendidik;
 7. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;
 8. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
 9. Pelaksanaan wajib belajar;
 10. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
 11. Pemberdayaan peran masyarakat;
 12. Pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan
 13. Pelaksanaan pengawasan dalam system pendidikan nasional. ⁴

3. Pendidikan Menengah Dalam Sistem Pendidikan Nasional

1. Pendidikan Menengah Sebagai Lembaga / Institusi

Pendidikan menengah diselenggarakan sebagai kelanjutan dari pendidikan dasar, yang berfungsi untuk menyiapkan peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan berinteraksi secara produktif dengan lingkungan social, budaya, dan alam sekitar dan atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan menengah terdiri atas sekolah menengah tingkat pertama dan sekolah menengah tingkat atas. Sekolah menengah tingkat atas terdiri atas sekolah menengah umum dan sekolah kejuruan. Penyelenggaraan pendidikan terbuka dan jarak jauh pada tingkat pendidikan menengah selain harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik memasuki masa remaja, juga perlu diorientasikan pada pendidikan untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan memasuki dunia kerja. Karakteristik proses pembelajaran mandiri pada tingkat pendidikan menengah sekaligus harus merupakan suatu proses pendewasaan baik dalam aspek akademik maupun kesiapan menguasai ketrampilan hidup yang dituntut

oleh dunia kerja. (Miarso,dkk, 2004)

Menurut Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tingkat Menengah menyatakan bahwa :

- Sekolah menengah umum adalah satuan pengajaran tingkat menengah yang melaksanakan proses belajar-pembelajaran dengan mengutamakan pada penanaman dan penumbuhan sikap ilmiah.
- Sekolah menengah alternative adalah bentuk satuan pengajaran tingkat menengah yang melaksanakan proses belajar-pembelajaran dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk memilih, mengikuti, dan memperoleh program dan kemampuan bervariasi sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan dengan bobot yang dibakukan.

2. Jenjang Pendidikan

Lembaga Pendidikan Formal

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Pasal 18 menyatakan bahwa jenjang pendidikan menengah adalah sebagai berikut (Dedi Hamid, *Undang-Undang, 2018*) :

1. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
2. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
3. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
4. Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pada hakekatnya, Pendidikan Menengah Keagamaan adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Lanjutan Pertama yang mengutamakan perluasan pengetahuan khusus tentang ajaran agama Islam yang diajarkan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memasuki masyarakat kerja (Departemen Agama RI, 1993).

Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) adalah jenis pendidikan menengah keagamaan yang mengutamakan penyiapan siswa dalam penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama Islam dan khasanah, Pemikiran Islam. Madrasah Aliyah Keagamaan merupakan bentuk satuan dari salah satu jenis pendidikan menengah yang berlangsung selama

tiga tahun dan diselenggarakan dalam system Pondok Pesantren/berasrama (boarding school). Dari konsep tersebut di atas, sistem pendidikan boarding school seolah menemukan pasarnya. Dari segi sosial, sistem boarding school mengisolasi anak didik dari lingkungan sosial yang heterogen yang cenderung buruk. Di lingkungan sekolah dan asrama dikonstruksi suatu lingkungan sosial yang relatif homogen yakni teman sebaya dan para guru pembimbing. Homogen dalam tujuan yakni menuntut ilmu sebagai sarana mengejar cita-cita.

3. Kurikulum Pendidikan Menengah

Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negarakesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan;

1. Peningkatan iman dan takwa;
2. Peningkatan akhlak mulia;
3. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
4. Keragaman potensi daerah dan lingkungan;
5. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
6. Tuntutan dunia kerja;
7. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
8. Agama;
9. Dinamika perkembangan global; dan
- j. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. (UU Sisdiknas Pasal 36)

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat :

- a. Pendidikan Agama;
- b. Pendidikan Kewarganegaraan;
- c. Bahasa;
- d. Matematika;
- e. Ilmu Pengetahuan Alam;
- f. Ilmu Pengetahuan Sosial;
- g. Seni dan Budaya;
- h. Pendidikan Jasmani dan Olahraga;
- i. Keterampilan/kejuruan;
- dan
- j. Muatan Lokal.

(Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Pasal 37)

Dalam kurikulum yang berorientasi pada pencapaian kompetensi, tujuan yang harus dicapai oleh siswa dirumuskan dalam bentuk kompetensi. Dalam konteks pengembangan kurikulum, kompetensi adalah perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.

Seseorang yang telah memiliki kompetensi dalam bidang tertentu bukan hanya mengetahui, tetapi juga dapat memahami dan menghayati bidang tersebut yang tercermin dalam pola perilaku sehari-hari. (Wina Sanjaya, 2007),

Pencapaian kompetensi tersebut meliputi :

- a. *Kompetensi Lulusan*, yaitu kemampuan minimal yang harus dicapai oleh peserta didik setelah tamat mengikuti pendidikan pada jenjang atau satuan pendidikan tertentu.

Dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 dijelaskan bahwa Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL- SP) dikembangkan berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan, yakni:

Pendidikan Menengah Kejuruan yang terdiri atas SMK/MAK bertujuan: Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruan.

- b. *Kompetensi Standar*, yaitu kemampuan minimal yang harus dicapai setelah anak didik menyelesaikan suatu mata pelajaran tertentu pada setiap

- Pada satuan pendidikan SMA/MA/SMALB/Paket C, tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan
- Pada satuan pendidikan SMK/MAK, tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan, kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan

- b. *Kompetensi Dasar*, yaitu kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penguasaan konsep atau materi pelajaran yang diberikan dalam kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Dilihat dari tujuannya kurikulum, kompetensi dasar termasuk tujuan pembelajaran.

4. Guru / Pendidik

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Pasal 42, menyatakan bahwa :¹²

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.

- (3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 menyatakan bahwa :

1. Kurikulum

Ada beberapa persoalan berkenaan dengan ini. *Pertama*, beban kurikulum pada lembaga-lembaga pendidikan menengah lebih berat dari lembaga pendidikan lainnya. Sebab ada keinginan agar peserta didik dapat memiliki bekal ilmu pengetahuan umum dan agama secara seimbang. *Kedua*, isi kurikulumnya agar dapat membentuk manusia profesionalis guna memiliki keterampilan tertentu sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja.¹⁷

2. Struktur dan Kultural

Secara structural lembaga-lembaga pendidikan menengah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Ketrampilan berada di bawah naungan Departemen Agama. Disebabkan karena hambatan structural maka dari segi pendanaan terdapat perbedaan antara lembaga pendidikan yang dikelola oleh Departemen Agama dengan lembaga pendidikan yang dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional, dampaknya berpengaruh kepada kualitas. Sedangkan masalah yang bersifat cultural, lembaga-lembaga pendidikan Islam terutama kelompok menengah ke atas. Karena itu pemberdayaan yang diharapkan dari partisipasi stakeholder masih kurang.

Ditinjau dari segi pengembangan pendidikan Islam ke depan ada masalah yang bersifat epistemologi keilmuan, yakni bagaimana merancang terintegrasinya ilmu-ilmu yang selama ini digolongkan kepada *perennial knowledge* dengan *acquired knowledge*. Di Indonesia upaya ini telah dilakukan langkah-langkahnya. *Pertama*, memasukkan mata pelajaran agama ke sekolah-sekolah umum. *Kedua*, sekolah umum plus madrasah diniyah. *Ketiga*, memasukkan mata pelajaran agama ke sekolah umum. *Keempat*, Madrasah SKB Tiga Menteri tahun 1975. *Kelima*, program IDI (Islam untuk Disiplin Ilmu). *Keenam*, madrasah sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam. Langkah-langkah yang belum selesai adalah soal Islamisasi ilmu atau setidaknya ilmu yang berwawasan Islam.

Pendidikan Islam semakin kukuh kedudukannya setelah masuk dan inklusif dalam system pendidikan nasional yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 1989 yang selanjutnya diatur pula serangkaian, Peraturan Pemerintah yang berkenaan dengan pendidikan yang relevan dengan UU No. 20 Tahun 2003. Untuk mengukuhkan

eksistensi pendidikan Islam di Indonesia, maka usaha ke depan adalah bagaimana memberdayakannya dan mengembangkannya. Untuk memberdayakannya perlu dicarikan way out atau solusi dari berbagai problema yang sedang dihadapi-tenaga pendidik, sarana fasilitas, kurikulum, structural dan cultural. (Muhaimin, 2005)

PEMBAHASAN

ANALISIS PENDIDIKAN MENENGAH DAN KEJURUAN DALAM MENERAPKAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL

1. Tantangan

Tantangan dalam mengimplementasi Kebijakan Pendidikan Menengah dan Kejuruan Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan menengah dan kejuruan di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah:

- kurangnya fasilitas dan infrastruktur,
- kurangnya dukungan keuangan, dan
- kurangnya kesesuaian antara kurikulum dan kebutuhan pasar kerja.

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan menengah dan kejuruan tidak dapat dilakukan dengan mudah, dan memerlukan perencanaan yang matang serta dukungan dari berbagai pihak.

2. Dukungan Pemerintah dan Kerjasama Antar Stakeholder

Dalam menghadapi tantangan dalam implementasi kebijakan pendidikan menengah dan kejuruan, penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan penguatan peran pemerintah dan kerjasama yang erat antara pemerintah, industri, dan institusi pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan menengah dan kejuruan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai pihak lainnya seperti industri dan institusi pendidikan.

3. Kebutuhan Kualitas SDM

SDM yang Berkualitas Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan pendidikan menengah dan kejuruan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan menengah dan kejuruan tidak hanya memperluas akses ke pendidikan, tetapi juga memperbaiki kualitas pendidikan yang ada. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bagaimana untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan menengah dan kejuruan yang berkualitas.

4. Kesesuaian Antara Kurikulum dan Kebutuhan Pasar Kerja

Kesesuaian antara kurikulum dan kebutuhan pasar kerja juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan pendidikan menengah dan kejuruan. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum yang disajikan dalam pendidikan menengah dan kejuruan harus sesuai dengan kebutuhan pasar kerja agar lulusan dapat terserap dengan baik di dunia kerja. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bagaimana meningkatkan

kesesuaian antara kurikulum dan kebutuhan pasar kerja.

5. Peran Pendidikan Kejuruan dalam Meningkatkan Keterampilan dan Daya Saing Tenaga Kerja

Pendidikan kejuruan memiliki peran penting dalam meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan kejuruan harus diperkuat dan diberikan prioritas agar dapat memperbaiki kualitas dan relevansi pendidikan kejuruan. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan, diharapkan akan terjadi peningkatan keterampilan dan daya saing tenaga kerja, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional.

6. Tantangan dalam Implementasi Kurikulum 2013

Pada Pendidikan Menengah dan Kejuruan Penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum 2013 pada pendidikan menengah dan kejuruan masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya pelatihan bagi guru dan pengelola pendidikan, kurangnya sumber daya dan dukungan dari pemerintah, dan ketidaksesuaian antara kurikulum dan kebutuhan pasar kerja. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum 2013 pada pendidikan menengah dan kejuruan memerlukan dukungan yang kuat dari pemerintah dan industri, serta perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap kurikulum yang ada.

7. Peran Pendidikan Menengah dan Kejuruan dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 menimbulkan beberapa tantangan bagi dunia pendidikan, termasuk pendidikan menengah dan kejuruan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bagaimana pendidikan menengah dan kejuruan dapat mempersiapkan lulusannya untuk menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0. Hal ini menunjukkan bahwa peran pendidikan menengah dan kejuruan sangat penting dalam menghasilkan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan di masa depan.

Dari beberapa poin pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan menengah dan kejuruan di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, dan memerlukan dukungan yang kuat dari pemerintah, industri, dan institusi pendidikan. Selain itu, perlu diperhatikan bagaimana untuk meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan, meningkatkan kesesuaian antara kurikulum dan kebutuhan pasar kerja, serta mempersiapkan lulusan pendidikan menengah dan kejuruan untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Kontribusi Pendidikan Menengah dan Kejuruan dalam Pembangunan Nasional Pendidikan menengah dan kejuruan memiliki kontribusi yang besar dalam pembangunan nasional. Melalui pendidikan menengah dan kejuruan yang berkualitas, lulusan dapat memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pendidikan menengah dan kejuruan juga dapat membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan dengan mempersiapkan lulusannya untuk masuk ke dunia kerja atau berwirausaha.

Kebijakan Pemerintah dalam Peningkatan Pendidikan Menengah dan Kejuruan Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam upaya meningkatkan pendidikan menengah dan kejuruan di Indonesia, antara lain:

- Program Revolusi Industri 4.0 yang mencakup peningkatan kompetensi SDM dan adaptasi teknologi
- Peningkatan anggaran pendidikan, termasuk pendidikan menengah dan kejuruan
- Peluncuran program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan KIP Kuliah D3/Vokasi untuk membantu biaya pendidikan bagi siswa dan mahasiswa di perguruan tinggi
- Program Pembangunan Infrastruktur Pendidikan, termasuk pembangunan pusat-pusat pelatihan dan laboratorium untuk pendidikan kejuruan.

Namun, masih banyak tantangan yang perlu diatasi dalam implementasi kebijakan pendidikan menengah dan kejuruan di Indonesia, seperti kurangnya sumber daya, kurangnya keterampilan guru dan pengelola pendidikan, serta ketidaksesuaian antara kurikulum dan kebutuhan pasar kerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap kebijakan pendidikan menengah dan kejuruan dalam konteks pendidikan nasional di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pendidikan menengah dan kejuruan memiliki peran penting dalam meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja, serta memiliki kontribusi besar dalam pembangunan nasional. Namun, implementasi kebijakan pendidikan menengah dan kejuruan masih menghadapi beberapa tantangan, dan memerlukan dukungan yang kuat dari pemerintah, industri, dan institusi pendidikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan, meningkatkan kesesuaian antara kurikulum dan kebutuhan pasar kerja, serta mempersiapkan lulusan pendidikan menengah dan kejuruan untuk menghadapi tantangan di masa depan.

SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, ada beberapa saran yang dapat diambil untuk meningkatkan implementasi kebijakan pendidikan menengah dan kejuruan di Indonesia, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan dengan mengintegrasikan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan industri dan memperkuat pelatihan keterampilan praktis.
2. Memberikan dukungan yang lebih besar pada institusi pendidikan kejuruan, termasuk guru dan staf administrasi, untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan manajemen pendidikan.
3. Meningkatkan kerja sama antara industri dan institusi pendidikan kejuruan dalam pengembangan kurikulum dan pelatihan keterampilan.
4. Meningkatkan akses dan dukungan keuangan bagi siswa dan mahasiswa pendidikan menengah dan kejuruan melalui program beasiswa dan bantuan keuangan lainnya.
5. Memperluas jaringan kerja sama internasional untuk memperoleh pengalaman dan praktik terbaik dalam pendidikan kejuruan.

Dengan mengambil tindakan-tindakan tersebut, diharapkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan menengah dan kejuruan dapat lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan

kualitas dan relevansi pendidikan kejuruan, serta mempersiapkan lulusannya untuk menghadapi tantangan di masa depan.

REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan di atas, ada beberapa rekomendasi yang dapat diambil untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan menengah dan kejuruan di Indonesia, yaitu:

1. Meningkatkan dukungan pemerintah untuk pengembangan pendidikan kejuruan, terutama dalam hal pengembangan kurikulum, fasilitas dan infrastruktur, dan pengembangan staf pengajar.
2. Meningkatkan sinergi antara industri dan lembaga pendidikan kejuruan dalam rangka memastikan kurikulum dan pelatihan keterampilan yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
3. Meningkatkan akses dan dukungan keuangan bagi siswa dan mahasiswa pendidikan menengah dan kejuruan, termasuk melalui program beasiswa dan bantuan keuangan lainnya.
4. Mendorong inovasi dan pengembangan teknologi dalam pendidikan kejuruan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi proses pembelajaran.
5. Meningkatkan jangkauan dan kualitas program magang dan kerja praktek untuk meningkatkan keterampilan dan pengalaman kerja siswa dan mahasiswa pendidikan kejuruan.

Dengan mengambil rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan implementasi kebijakan pendidikan menengah dan kejuruan dapat lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan kejuruan, serta mempersiapkan lulusannya untuk menghadapi tantangan di masa depan.

BIBLIOGRAPY

- Djarmiko, I. W. (2003). *Inkonsistensi Penyelenggaraan Pendidikan SMA dan SMK Istanto W. Djarmiko I.* 1–7.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Daulay, Haidar Putra, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta : Pranada Media, 2004).
- Departemen Agama RI, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan* , (Surabaya : Departemen Agama, Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, 2005).
- Departemen Agama RI, *Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah Keagamaan*, (Jakarta : Departemen Agama, 1993)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan* , (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, 2006).
- Hamid, Dedi, *Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta : Durat Bahagia, 2003).

- Miarso, Yusufhadi, *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*, (Jakarta : PrenadaMedia, 2004).
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2005).
- Rosyada, Dede, *Paradigma Pendidikan Demokratis* , (Jakarta : Prenada Media, 2004)
- Sanjaya, Wina, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan* , (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007).
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989, *Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional*, (Semarang : Tugu Muda, 1989).
- Undang-Undang Sisdiknas, *UU No. 20 Tahun 2003*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2003).
- Djamarah, Syaiful Bahri. (2010). *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Buku Saku Statistik Pendidikan 2016/2017*. Jakarta: Kemendikbud.
- Mulyasa, E. (2016). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Implementasinya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nasution, S. (2014). *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudjana, N. (2015). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Arifin, Z. (2018). The Challenges of Technical and Vocational Education in Indonesia. *Journal of Technical Education and Training*, 10(2), 1-9.
- Bappenas. (2018). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kemenristekdikti. (2016). *Buku Putih Pendidikan Tinggi 2016*. Jakarta: Kemenristekdikti.
- Setiawan, B. (2017). Pendidikan Kejuruan di Indonesia: Kebijakan, Implementasi, dan Tantangan. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 7(1), 1-10.
- Yusuf, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan Menengah dan Kejuruan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kebijakan dan Perkembangan*, 2(2), 77-85.
- Anwar, K., & Hidayat, A. (2019). Implementation of Education for Sustainable Development in the Indonesian National Education Curriculum. *Journal of Sustainable Development*, 12(3), 1-11.
- Haryanto, A., & Sari, Y. K. (2018). The Impact of School Principals' Leadership Styles on Teachers' Job Satisfaction in Indonesian Junior High Schools. *Journal of Education and Practice*, 9(1), 1-10.
- Kurniawan, D. Y., & Susilo, A. (2019). Perceptions of Indonesian EFL Students on Using Online Video Streaming in Learning English. *English Language Teaching*, 12(5), 1-9.
- Saptarini, N. M., & Karyanto, P. (2017). Developing Authentic Assessment for Indonesian EFL Classroom. *Journal of Language Teaching and Research*, 8(3), 452-459.
- Suprayitno, E., & Faisal, F. (2020). The Effect of Project Based Learning Model on Mathematics Learning Outcomes in Indonesian Junior High Schools. *Journal of Physics: Conference Series*, 1521(2), 1-7.
- Iskandar, J. (2012). *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.

- Thoha, M. (2012). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar . *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 21-34. Retrieved from <http://ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/view/2477/1272>
- Wahyudi, A. (2016). Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* , 2(2), 101-105. Retrieved from <http://ejournalf.ia.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/566/851>
- Godin, R. E., Rein, M., & Moran, & M. (2006). The Public and its Policies. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin, *The Oxford Handbook of Public Policy* (pp. 3-35). New York: Oxford University Press
- Freeman, R. (2006). Learning in Public Policy. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin, *The Oxford Handbook of Public Policy* (p. 367). New York: Oxford University Press.
- Thoha, M. (2012). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahab, S. A. (2010). *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta